



APBD 2016

Pemkot Siapkan Empat Strategi Berantas Kemiskinan

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja sudah menyiapkan sejumlah program untuk memberantas angka kemiskinan.

Program tersebut tertuang dalam empat strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jogja.

Keempat strategi tersebut adalah mengurangi beban masyarakat dengan memberikan bantuan biaya pendidikan melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan menanggung biaya kesehatan melalui APBD. Kedua, meningkatkan

ekonomi masyarakat melalui bantuan kelompok usaha bersama (Kube) dan peningkatan keterampilan usaha.

Ketiga, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan bantuan modal usaha, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW). Dan keempat, melakukan sinergitas program dan kegiatan lintas sektoral.

Kepala Dinas Pendapatan Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja, Kadri Renggono mengatakan keempat strategi pembangunan jangka menengah

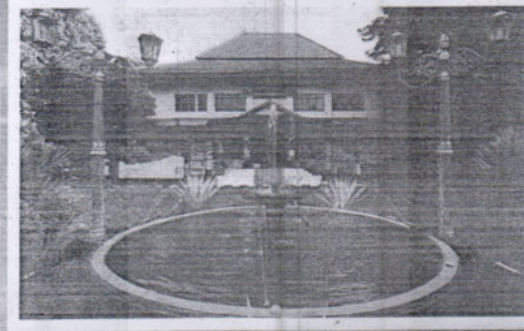
dalam APBD 2016 sudah dituangkan melalui masing-masing dinas.

"Tahun ini kita mewujudkan masyarakat Kota Jogja yang sejahtera, berbudaya, bermartabat, dan berlandaskan pada penguatan ekonomi kewilayahan," kata Kadri, Selasa (12/1).

Kadri menjelaskan dalam mengurangi beban masyarakat atas biaya pendidikan dan kesehatan pihaknya telah mengalokasikan anggaran belanja untuk kedua kebutuhan dasar tersebut melebihi apa yang diharuskan undang-undang. Alokasi pendidikan mencapai 37,58% dari total belanja daerah sebesar Rp1,8 triliun. Demikian juga alokasi untuk pemenuhan kesehatan sudah pada angka 125%, lebih tinggi dari yang diharuskan yakni 10%.

Program kesehatan di antaranya melalui pembangunan sejumlah layanan rumah sakit, seperti Rumah Sakit Pratama, rehabilitasi puskesmas, dan membantu menjamin biaya kesehatan bagi masyarakat Jogja melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang sebagian sudah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Sementara peningkatan ekonomi wilayah selain bantuan kelompok usaha bersama, pihaknya juga berencana merehabilitasi sejumlah pasar tradisional, perbaikan infrastruktur pariwisata, pembangunan infrastruktur jalan, serta berusaha mengurai



kemacetan. "Kita akan terus berupaya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu," jelas Kadri.

Ia mengakui struktur belanja daerah tahun ini melebihi pendapatan, namun belanja yang lebih besar itu diklaimnya untuk kepentingan dasar masyarakat dalam rangka membangun kesejahteraan. Pemkot Jogja juga terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah.

Selain belanja pendidikan dan kesehatan yang sudah melebihi aturan, belanja otonomi daerah kota Jogja juga terbilang besar mencapai 27,88 % dari total anggaran belanja. Kadri menyatakan otonomi daerah akan berhasil ketika masyarakat semakin pintar, masyarakat semakin sehat, "Dan dalam dompetnya tidak pernah kosong, selalu ada uang," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad optimis mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,4% pada 2017 mendatang dengan menjalankan empat strategi yang sudah disusun. Target penurunan angka kemiskinan sampai angka 0,4 % di awal tahun 2017 mendatang.

Angka kemiskinan Kota Jogja sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada angka 8,8% dari total jumlah penduduk 400.467 jiwa. "Perkiraan kami sesuai amanat

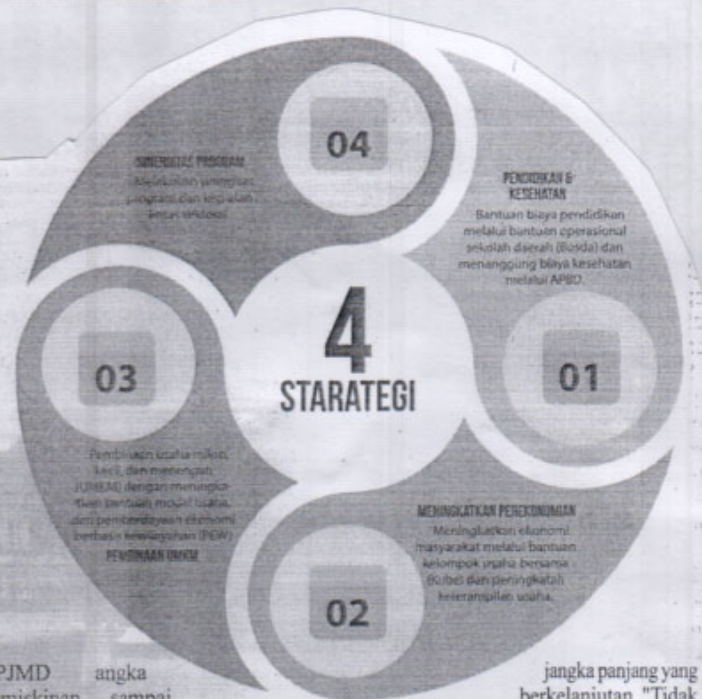
RPJMD angka kemiskinan sampai pada angka 8,4%," kata Edy.

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jogja Sujanarko menilai masih tingginya angka kemiskinan karena program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Kota cenderung setengah-setengah, dan dilakukan oleh masing-masing SKPD tanpa terkoordinasi sehingga memunculkan ego sektoral.

Menurutnya, untuk pengentasan kemiskinan perlu membuat program

jangka panjang yang berkelanjutan. "Tidak hanya setahun putus. Harusnya program dibuat minimal jangka tiga tahun sehingga bisa terlihat efeknya," ujar Sujanarko yang juga Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.

Namun Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Ali Fahmi, beberapa waktu lalu, menilai penanganan kemiskinan di Kota Jogja masih terbilang cukup baik. Hanya perlu koordinasi antar SKPD. (*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005